

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat populasi yang tinggi. Dilihat dari data Badan Pusat Statistika (BPS) yang dikutip oleh (Annur, 2023), jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan 2023 mencapai 278,69 juta jiwa. Jumlah penduduk tersebut meningkat sebesar 1,05% dibandingkan tahun sebelumnya, di mana pada pertengahan 2022 jumlah penduduk Indonesia mencapai 275,77 juta jiwa. Dengan populasi yang terus bertambah, Indonesia menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah kemiskinan. Kemiskinan sendiri merupakan suatu kondisi di mana seorang individu atau kelompok tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti sandang, pangan, serta papan. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kurangnya dalam segi materi saja, tetapi hal ini juga mencakup ketidaksetaraan dalam akses terhadap peluang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Sejalan dengan pendapat (Rustanto, 2015) bahwasannya fenomena yang terjadi di Indonesia menggambarkan kondisi ketidakmampuan yang dialami oleh individu, kelompok, dan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan tingginya angka pengangguran dan ketidakmampuan warga untuk mengakses program atau layanan pemerintah, sehingga mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Kemiskinan di Indonesia memang menjadi permasalahan serius yang kompleks. Hal ini dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tingginya tingkat kemiskinan melibatkan berbagai aspek, termasuk rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya akses terhadap pekerjaan yang layak, dan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya. Sama halnya dengan pendapat Tjokrowinoto dalam (Pratiwi, Noorsyarifa, & Apsari, 2022) bahwasannya kemiskinan ini tidak hanya terkait dengan kesejahteraan masyarakat saja, tetapi juga berkaitan dengan masalah kerentanan (*vulnerability*), ketidakberdayaan (*powerless*), keterbatasan akses terhadap lapangan kerja, penghasilan yang habis untuk memenuhi kebutuhan

konsumsi, tingginya tingkat ketergantungan, serta budaya kemiskinan yang diturunkan dari generasi sebelumnya dan masih berlangsung saat ini.

Dalam mengatasi permasalahan ini, tentu diperlukan adanya upaya dari berbagai sektor, termasuk peningkatan akses pendidikan, memberikan pelatihan kerja yang sesuai, dan menerapkan kebijakan ekonomi yang mendukung distribusi yang lebih merata. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui program-program pembangunan ekonomi lokal juga dapat menjadi langkah penting untuk mengurangi ketidaksetaraan dan meningkatkan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat. Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan Maret 2023 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,90 juta orang atau sekitar 9,36% dari total populasi. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,46 juta orang dibandingkan dengan September 2022, dan penurunan sebesar 0,26 juta orang dibandingkan dengan Maret 2022 (BPS, 2023). Meskipun terjadi penurunan dalam presentase penduduk miskin di Indonesia dari tahun sebelumnya, angka ini tetap tinggi.

Maka dari itu, perlu dilakukan upaya penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 166 tahun 2004 mengenai percepatan penanggulangan kemiskinan pasal 1 ayat 2, program ini mencakup kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan dukungan untuk usaha ekonomi mikro dan kecil, serta berbagai program lainnya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi.

Program tersebut diantaranya yaitu Program Indonesia Pintar (PIP) yang menggunakan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Indonesia Sehat (PIS) dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), serta berbagai program lainnya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin (Poluakan, 2019) dalam (Pratiwi, Noorsyarifa, & Apsari, 2022). Salah satu langkah kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Sebagaimana dijelaskan dalam

Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 mengenai Program Keluarga Harapan (PKH), bahwa program ini memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau individu yang termasuk dalam kategori miskin dan rentan, berdasarkan data terpadu program penanganan fakir miskin yang dikelola oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial untuk mereka yang terdaftar sebagai penerima manfaat PKH.

Tujuan utama dari PKH ini ialah untuk mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan sumber daya manusia (SDM), dan mengubah *mindset* dan perilaku masyarakat untuk memiliki kesadaran dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), program keluarga harapan (PKH) memberikan akses bagi penerima manfaat untuk dapat memanfaatkan berbagai akses layanan, seperti layanan kesehatan (faskes), layanan pendidikan (fasdik), pangan dan gizi, pendampingan, serta berbagai program perlindungan sosial lainnya. PKH atau yang dikenal dengan *Conditional Cast Transfer* (CCT) atau bantuan tunai bersyarat, telah diimplementasikan sejak tahun 2007. Program ini merupakan inisiatif dari Kementerian Sosial yang bekerja sama dengan BKKBN, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan Nasional. Dalam pelaksanaannya, PKH melibatkan pendamping di setiap daerah yang memegang peran penting dalam mengembangkan dan memastikan keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH).

Dalam program keluarga harapan (PKH), terdapat salah satu persyaratan yang wajib diikuti oleh setiap penerima manfaat PKH yaitu mengikuti pertemuan setiap bulan antara keluarga penerima manfaat dengan pendamping PKH. Pertemuan ini dikenal sebagai pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) atau *family development session* (FDS), yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya pengasuhan dan pendidikan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan, perlindungan anak dan kesejahteraan sosial di dalam lingkup keluarga. Hal ini diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku yang lebih baik (Pedoman Pelaksanaan PKH, 2021: 36) dalam (Depari, Riasih, & Rosilawati, 2023). Kegiatan P2K2 ini dilaksanakan secara rutin setiap bulan dan difasilitasi oleh pendamping PKH.

Sebagaimana dijelaskan oleh (Nandini, Putri, Setiawan, Anggraeni, & Fedryansyah, 2022) pendamping berperan sebagai fasilitator yang memberikan dorongan dan motivasi kepada masyarakat. Sebagai elemen kunci dalam kesuksesan Program Keluarga Harapan (PKH), peran pendamping memiliki signifikansi yang besar. Pendamping memiliki tanggungjawab dalam mengembangkan dan memastikan keberhasilan pelaksanaan PKH termasuk kegiatan di dalamnya yaitu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2). Mereka berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan keluarga penerima manfaat, memberikan arahan, memberikan dukungan, memberikan edukasi, dan memastikan bahwa manfaat yang diberikan melalui PKH dapat dirasakan secara maksimal oleh mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, kehadiran pendamping juga sebagai agen perubahan yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Halimah, 2019) keberhasilan suatu program dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah peran pendamping. Dijelaskan bahwa pendamping memainkan peran yang krusial dalam memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh KPM PKH dan memberikan keyakinan kepada KPM terkait kemampuan mereka dalam melakukan berbagai aktivitas. Oleh karena itu, pentingnya peran pendamping sebagai kunci dalam mempercepat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Peran pendamping memiliki peranan yang sangat vital dalam membantu masyarakat mengidentifikasi permasalahan, menyediakan alternatif, dan mendorong peningkatan taraf hidupnya. Disamping itu, peran pendamping juga penting untuk dalam memberikan motivasi, pendampingan, serta memberikan kegiatan keterampilan masyarakat, sehingga mereka dapat menggali potensi sendiri dan tidak hanya bergantung pada bantuan. Semua upaya ini dilakukan untuk mencapai tujuan program keluarga harapan (PKH) dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat hidup mandiri.

Pendamping dalam peranannya mendampingi masyarakat penerima bantuan untuk meningkatkan taraf hidupnya dan membantu meningkatkan pengetahuan

dan keterampilannya melalui kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) dapat dilakukan melalui strategi pembelajaran berdiferensiasi guna mencapai hasil yang optimal. Hal ini disampaikan juga oleh Bauera, Gartmeier, Wiesbeck, Moeller, Karsten, Fischer & Prenzel (2018) dalam (Herwina, 2021) yang mengatakan bahwa penerapan strategi berdiferensi memberikan manfaat praktis dalam tiga dimensi kompetensi percakapan, yakni kemampuan menyusun percakapan, mengembangkan solusi untuk masalah, dan membangun hubungan interpersonal yang positif.

Maka dari itu, peran pendamping PKH bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar memiliki kemandirian dan kemampuan untuk mengembangkan diri serta bertanggung jawab terhadap perkembangan hidupnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran pendamping dalam suatu program sangatlah penting untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bagi para penerima bantuan PKH.

Kelurahan Sambongjaya terletak di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, merupakan salah satu daerah yang mendapatkan perhatian khusus dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH). Jumlah penerima bantuan PKH di Kelurahan Sambongjaya mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara, pada tahun 2023 jumlah penerima bantuan PKH di Kelurahan Sambongjaya mencapai 1.438 keluarga. Kenaikan ini mencerminkan komitmen pemerintah setempat untuk memperluas cakupan bantuan sosial kepada keluarga yang membutuhkan, serta memberikan dukungan lebih luas dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat.

Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) di Sambongjaya, masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat dalam pencapaian harapan dan tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu masalah yang dihadapi yaitu banyaknya keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak hadir dalam kegiatan rutin, yaitu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2). KPM lebih antusias menunggu kegiatan sosialisasi mengenai bantuan, tetapi

kurang berminat pada P2K2. Selain itu, kemampuan masyarakat belum menunjukkan perkembangan yang signifikan setelah mengikuti kegiatan P2K2.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Peran Pendamping Program Keluarga Harapan dalam Kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memberikan pokok permasalahan yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

- a. Banyaknya keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak hadir dalam kegiatan rutin, yaitu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2).
- b. KPM lebih antusias menunggu kegiatan sosialisasi mengenai bantuan, tetapi kurang berminat pada P2K2.
- c. Kemampuan masyarakat belum menunjukkan perkembangan yang signifikan setelah mengikuti kegiatan P2K2.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pendamping program keluarga harapan dalam pertemuan peningkatan kemampuan keluarga di Kelurahan Sambongjaya?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yaitu untuk mendeskripsikan peran pendamping program keluarga harapan dalam pertemuan peningkatan kemampuan keluarga di Kelurahan Sambongjaya.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh hasil penelitian yang dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini secara terperinci adalah:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam tentang peran pendamping program keluarga harapan dalam pertemuan peningkatan kemampuan keluarga.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan arahan yang jelas bagi pelaksanaan program PKH dengan fokus pada peran pendamping, sehingga dapat meningkatkan efektivitas kegiatan P2K2 dan memberikan dampak positif secara nyata dalam peningkatan kemampuan keluarga penerima manfaat.

1) Bagi Pendamping PKH

Penelitian ini diharapkan memberikan panduan praktis kepada pendamping PKH untuk menjalankan peran mereka dalam Kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), dengan fokus pada strategi implementasi yang efektif dan pemberdayaan keluarga penerima manfaat.

2) Bagi Pemerintah

Penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah terkait peran pendamping PKH dalam P2K2. Informasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan dampak program PKH secara keseluruhan.

3) Bagi Kelompok Penerima Manfaat (KPM)

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat penerima manfaat PKH dengan meningkatkan kualitas dan relevansi kegiatan P2K2, sehingga keluarga dapat lebih mandiri dan meningkatkan kemampuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan.

4) Bagi Peneliti

Sebagai pengetahuan mengenai peran pendamping program keluarga harapan (PKH) dalam pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2).

1.6 Definisi Operasional

Sebelum membahas tinjauan penelitian, terlebih dahulu perlu dijelaskan definisi operasional mengenai istilah-istilah untuk mempertegas, memberikan arah, dan menghindari kesalahpahaman. Definisi operasional sendiri harus tidak menimbulkan keraguan pada peneliti dan orang lain. Maka dari itu, dalam penelitian harus memiliki definisi operasional yang jelas. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Peran Pendamping Program Keluarga Harapan dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga”. Maka definisi operasional yang dapat dijelaskan, adalah sebagai berikut:

a. Peran Pendamping

Pendamping merupakan seorang individu ataupun kelompok yang memberikan dukungan, bantuan kepada orang lain dalam berbagai aspek kehidupan, bertujuan untuk memfasilitasi perkembangan atau kelancaran suatu proses. Peran pendamping program keluarga harapan (PKH) di Kelurahan Sambongjaya dalam pertemuan peningkatan kemampuan keluarga yakni berperan sebagai fasilitatif, edukasional, perwakilan, dan teknis.

b. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

Program keluarga harapan (PKH) adalah salah satu program pemerintah berupa bantuan sosial dengan memberikan berupa uang tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan program keluarga harapan (PKH) yang dilakukan di Kelurahan Sambongjaya yaitu melakukan kegiatan pencairan dana bantuan dan pertemuan rutin sebulan sekali yaitu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2).

c. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) merupakan kegiatan yang dirancang untuk membantu keluarga penerima manfaat PKH dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan dukungan yang diperlukan guna meningkatkan kesejahteraan. Kegiatan yang dilakukan dalam P2K2 di Kelurahan Sambongjaya ini yaitu memberikan informasi terkait PKH, memberikan pengetahuan terkait pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial,

ekonomi, memberikan dukungan, sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya. Namun, kegiatan rutin PKH yaitu P2K2 Di Kelurahan Sambongjaya masih terdapat KPM yang tidak mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini berdampak pada perubahan perilaku dan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup pada KPM.